

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023. Laporan Kinerja disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Laporan ini menyajikan informasi pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tidak seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target, masih terdapat capaian indikator kinerja kurang dari 100%. Namun dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam menyiapkan perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta referensi untuk perumusan dan penentuan kebijakan/program di tahun berikutnya

Tangerang Selatan, 13 Februari 2024

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN



EKI HERDIANA, ST, MT

NIP. 19770704 200212 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	4
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	68
4.2 Saran	69

Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan
5. Pengukuran Pencapaian Sasaran
6. Cascading IKU
7. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama
8. SOP Penyusunan Lakip
9. SOP Penyusunan IKU
10. SOP Penyusunan PK
11. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan menjawab perjajian kinerja antara Wali Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi mandat dan kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan sebagai penerima mandat.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, meliputi:

1. Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota pada tahun 2023 sebesar 22,12. Dari target sebesar 26, maka capaian kinerja mencapai 87,88% (kriteria capaian tinggi).
2. Nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota pada tahun 2023 sebesar 19,93. Dari target sebesar 21, maka capaian kinerja mencapai 82,55% (kriteria capaian tinggi).
3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada tahun 2022 sebesar 89,47% Dari target sebesar 40%, maka capaian kinerja mencapai 223,68 % (kriteria capaian sangat tinggi).
4. Nilai Lakip OPD pada tahun 2023 memperoleh nilai A dari target sebesar nilai A, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (kriteria capaian sangat tinggi).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tidak seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target, masih terdapat capaian indikator kinerja kurang dari 100%. Namun dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan.

Pencapaian indikator sasaran strategis Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan didukung sumberdaya termasuk sumberdaya



keuangan. Pagu anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 33.214.608.055, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.890.353.733 (93% dari pagu).

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dalam menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja di masa mendatang, di antaranya meliputi:

1. Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Bappelitbangda berperan dalam pencapaian sasaran strategis daerah, yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota, nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota masih belum memenuhi target dan masih jauh di bawah target akhir periode Renstra. Target yang ditetapkan terlalu tinggi melebihi ekpektasi dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.
3. Pencapaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai target sesuai dengan rencana, namun belum diikuti pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan. Output yang dihasilkan dari kegiatan dan sub kegiatan belum dapat mengungkit kinerja sasaran Bappelitbangda.

Dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan perlu dilakukan upaya dalam menyikapi tantangan kedepannya di antaranya melalui:

1. Personil Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan agar lebih memberikan perhatian terhadap capaian indikator kinerja dalam sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Perlu dilakukan evaluasi atas capaian Renstra Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026. Termasuk menilai rasionalisasi atas target kinerja yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai serta merekomendasikan target kinerja yang memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*) namun tetap menantang (*challenging*).
3. Menyusun rencana kinerja jangka panjang dan jangka pendek serta menetapkannya dengan mempedomani RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, serta menyusun pohon kinerja dan *cascading*.
4. Menyusun pedoman perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja bagi seluruh perangkat daerah.
5. Tetap melanjutkan pendampingan kepada perangkat daerah, namun disertai dengan peningkatan kapasitas pendamping dari Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan.
6. Perlunya menerapkan manajemen kinerja PNS secara baik dan membentuk tim pengelola kinerja PNS di tingkat perangkat daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara, meliputi: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan Negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas dan (7) asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sistem akuntabilitas secara baik menjadikan instansi pemerintah akuntabel, yang dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintahan yang akuntabel juga menunjukkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan reviu dan evaluasi Kinerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.



Laporan kinerja merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pemberi dan penerima mandate/amanah, berisi hasil pengukuran capaian kinerja, serta hasil analisis dan evaluasi kinerja. Laporan kinerja diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan dapat memberikan perbaikan bagi instansi/organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan, memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Bappelitbangda berperan dalam pencapaian sasaran strategis daerah, yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan, Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja antara Kepala Bappelitbangda dengan Wali Kota Tangerang Selatan, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja yang dapat diakses oleh dipublik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026; dan
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan kepada pemberi mandat atas kinerja tahun 2023, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana pelaksanaan rencana dan kegiatan telah tercapai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk periode tersebut

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Melaporkan capaian atas target indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan pemberi mandat/amanah.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
3. Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja di tahun mendatang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
2. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
3. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
5. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;
6. pengkajian, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
7. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota;
10. pengoordinasian pendampingan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat wilayah dan forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah;



11. pengoordinasian pendampingan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
12. pengoordinasian penyusunan pertimbangan hibah dan bantuan sosial;
13. pemantauan dan pengendalian, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program perencanaan pembangunan Daerah;
14. fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
15. pengoordinasian pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah
16. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerjasama Daerah;
17. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;
18. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan;
19. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan;

1.4.1. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

- (1) Susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris dan membawahkan:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan



c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang dipimpin oleh kepala bidang.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;
- pengkajian, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;



- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota;
- pengoordinasian pendampingan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat wilayah dan forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah;
- pengoordinasian pendampingan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
- pengoordinasian penyusunan pertimbangan hibah dan bantuan sosial;
- pemantauan dan pengendalian, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program perencanaan pembangunan Daerah;
- fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
- pengoordinasian pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah
- pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerjasama Daerah;
- penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan;
- pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta mengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup Badan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Badan memiliki fungsi:



- pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Badan;
- pengoordinasian dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Badan;
- pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat;
- pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Badan;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal;
- pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah serta pemeliharaan aset Badan/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
- pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Badan;
- pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;



- penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan;
- pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Badan

Sekretaris Bappelitbangda dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bappelitbangda. dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator., yaitu :

a. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan Subbagian Keuangan;
- menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
- menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup Badan;
- melaksanakan tugas bendahara penerimaan lingkup Badan;
- menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
- menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen catatan atas laporan keuangan lingkup Badan;
- mengoordinasikan Laporan Keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;



- melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
 - menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup Subbagian Keuangan;
 - menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
 - melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
 - melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
 - melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
 - melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;



- melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan/Tingkat Wilayah;
- pengkajian, penyusunan dan pengoordinasian penetapan kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- pelaksanaan konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan kota;



- pengoordinasian pengumpulan data dan informasi pembangunan Daerah;
- penyusunan kebijakan inventarisasi, penyajian, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi pembangunan Daerah;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- pelaksanaan fasilitasi rapat Perangkat Daerah teknis terkait program kerja forum tanggung jawab sosial lingkungan;
- penyusunan kebijakan inventarisasi, penyajian, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi pembangunan Daerah;
- pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- pengoordinasian penyusunan, penyajian, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi pembangunan Daerah;
- pengendalian pelaksanaan kerjasama Daerah;
- penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah;
- penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator:

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan



produk hukum Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.



5. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian

Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian mempunyai fungsi :

- pengoordinasian perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian fasilitasi rapat dan monitoring program kerja forum tanggungjawab sosial lingkungan;
- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;



- penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian

Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan Daerah.. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- pengoordinasian dan perumusan penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penyebarluasan, dan fasilitasi hasil penelitian dan pengembangan;
- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;



- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang penelitian dan pengembangan

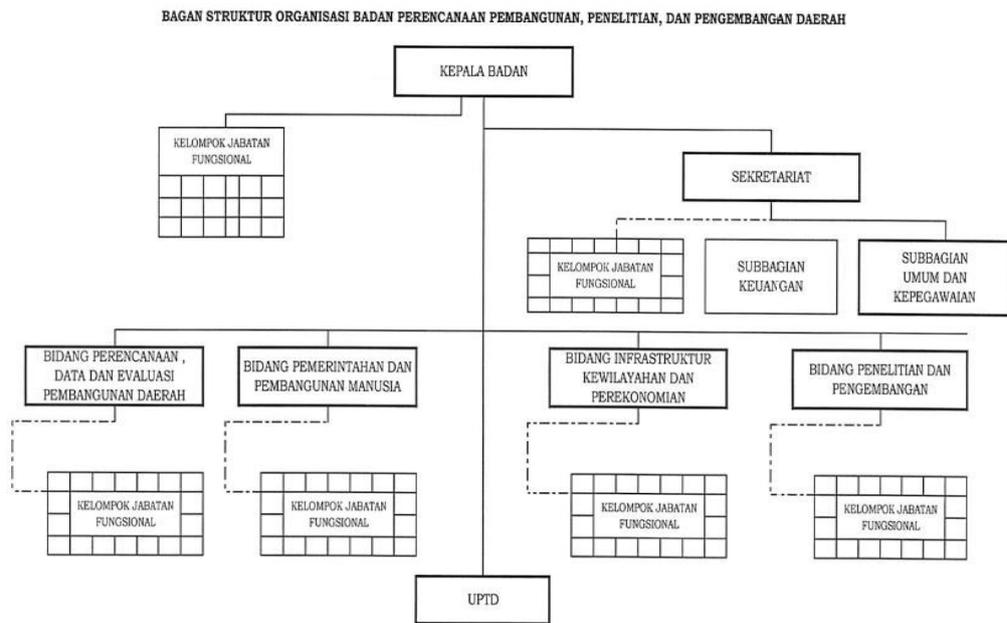
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pejabat fungsional memiliki tugas, dan uraian kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pejabat fungsional yang berasal dari jabatan pengawas diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrator
- (5) Nomenklatur dan tugas Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Struktur organisasi Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan

1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP 2023

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Bappelitbangda membahas rencana-rencana strategis yang menjadi target Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan di Tahun 2023. Rencana tersebut merupakan penjabaran arah kebijakan dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan untuk pencapaian kinerja Bappelitbangda. Untuk pengukuran dan peningkatan kinerja Bappelitbangda maka diuraikan sasaran-sasaran strategis dalam Renstra Bappelitbangda yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode 2021 - 2026 dan dirinci lagi ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya.

2.1 Rencana Strategis

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan agar Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di akhir periode perencanaan atau gambaran penyelesaian masalah yang ideal di Kota Tangerang Selatan. Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut maka dibuatlah Misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan hingga mencapai Visi. Sedangkan Program merupakan penjabaran kebijakan yang berbentuk usaha menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.

Adapun visi Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah 5 (Lima) Misi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 –2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul;
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi;



3. Membangun Kota yang Lestari;
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif; dan
5. **Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan selaku Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan mempunyai tugas dan fungsi untuk mengordinasikan, menyusun, membina, dan mengendalikan pelaksanaan Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan agar konsisten dengan target tujuan dan sasaran yang diamanatkan melalui Visi dan Misi RPJMD.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi tersebut Bappelitbangda memiliki kontribusi terhadap Misi 5 yaitu Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Peran Bappelitbangda dalam peran dalam membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien yaitu dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyusunan rencana pembangunan Kota Tangerang Selatan yang tepat sasaran, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkala serta evaluasi jalannya pemerintahan daerah yang terukur menggunakan sistem informasi yang dimiliki agar pengendalian berjalan lebih efektif. Adapun keberhasilan Bappelitbangda dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari seberapa banyak tujuan dan sasaran Bappelitbangda yang berhasil dicapai.

Tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda sesuai Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dan kelitbangan”

Selanjutnya tujuan dijabarkan ke dalam sasaran strategis untuk menggambarkan kondisi tahunan yang menandakan tercapainya tujuan di akhir tahun perencanaan. Adapun Sasaran strategis Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam Renstra tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatkan Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

Secara rinci target serta indikator dari tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda selama periode 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dan kelitbangan		Persentase capaian indikator kinerja Sasaran pembangunan	Nilai					100
			Indeks perencanaan pembangunan daerah	Nilai					10
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Nilai	25	26	27	28	29
			Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	20	21	22	23	24
			Nilai capaian Kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	16	17	18	19	20
		Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	30	40	50	60	70

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah indikator sasaran strategis perangkat daerah yang termuat dalam renstra dan indicator lainnya yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan selama 5 (lima) tahun. IKU Bappelitbangda dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.2

IKU Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan

NO	KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Lakip Kota
		Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	
2	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	(Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan/jumlah hasil kelitbangan) x 100%	Laporan tindak lanjut hasil kajian

Rencana kinerja disusun dengan mengacu kepada IKU dengan mempertimbangkan pagu anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2022, selanjutnya diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi mandat dan kepala Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan sebagai penerima mandate adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	26	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota
		Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	21	Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota
2	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	40%	(Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan/jumlah hasil kelitbangan) x 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip OPD	A	Nilai Lakip OPD



Untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan, dilaksanakan melalui program dan kegiatan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.770.016.295
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.917.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.968.586.171
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	672.820.250
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.535.128.392
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.900.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.486.206.850
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.616.457.632
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.362.501.430
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.304.355.800
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	266.210.600
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	791.935.030
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.834.497.360
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	649.017.260
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	557.820.400
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	627.659.700
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.247.592.970
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	143.225.000
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	131.075.800
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	377.964.400
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	595.327.770
	Total	33.214.608.055



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja menjawab perbandingan kinerja antara pemberi mandat dan penerima mandat yang telah ditandatangani secara bersama-sama, yaitu antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Laporan ini utamanya menjabarkan capaian kinerja organisasi yang memuat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selain itu dalam laporan kinerja diuraikan juga realisasi anggaran sebagai pertanggungjawaban keuangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pengukuran kinerja yang didapat dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan targetnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi sebagai input dalam siklus perencanaan di tahun/periode selanjutnya.

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih sederhana atas pencapaian kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dilakukan peng-kategorian sesuai tingkat capaian kinerja dengan mengikuti



pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengumpulan data capaian dan pengukuran kinerja, capaian kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sebagai indikator dari sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a. Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota
- b. Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota

Pada tahun 2023, terdapat 2 indikator yang sebelumnya terdapat 3 indikator, hal ini disebabkan oleh perubahan komponen penilaian pada Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada peraturan tersebut komponen nilai capaian kinerja dihapus. Sehingga sasaran Bappelitbangda adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja (1) nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota, (2) nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota semuanya belum memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani. Capaian kedua indikator kinerja tersebut merupakan capaian yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penilaian tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Nilai	26	22,12	85,08%
		Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	21	19,93	94,90%

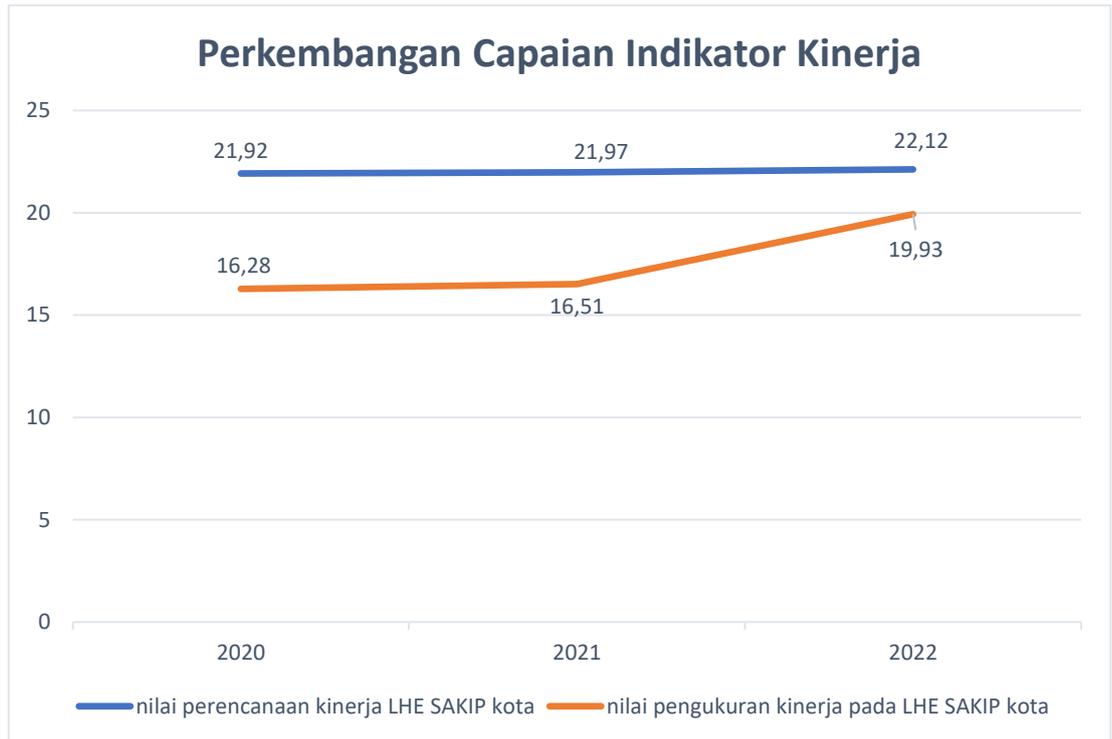
Capaian indikator kinerja nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota pada tahun 2023 sebesar 22,12. Dari target sebesar 26, maka capaian kinerja mencapai 85,08% (**kriteria capaian tinggi**). Sementara itu capaian indikator kinerja nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota pada tahun 2023 sebesar 19,93. Dari target sebesar 21, maka capaian kinerja mencapai 94,90% (**kriteria capaian tinggi**).

Tabel 3.3

Posisi Capaian Indikator Kinerja Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir	Capaian (%)	Nilai Maks
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Nilai	22,12	29	76,28	30
		Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	19,93	24	83,04	30

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026), capaian indikator kinerja nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota baru mencapai 76,28%, nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota mencapai 83,04%. Tabel di atas juga menyajikan informasi nilai maksimal dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan ketentuan dalam penilaian SAKIP dimana nilai maksimal indikator kinerja nilai perencanaan kinerja pada LHE SAKIP sebesar 30, nilai pengukuran kinerja sebesar 30.



Gambar 3.1

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagaimana gambar di atas, capaian indikator kinerja nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP kota cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP kota sebesar 21,65 dan meningkat menjadi 22,12 pada tahun 2023. Begitu pula dengan capaian indikator kinerja nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP kota yang meningkat dari 16,05 pada tahun 2020 menjadi 19,93 pada tahun 2023.

Capaian Sakip Kota Tangerang Selatan masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, oleh karena itu Bappelitbangda harus terus meningkatkan pelaksanaan Sakip di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, berikut dibawah ini gambaran perbandingan Nilai Sakip Kabupaten Kota di Provinsi Banten :

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sakip
1	Kabupaten Lebak	BB

2	Kabupaten Pandeglang	BB
3	Kabupaten Serang	BB
4	Kabupaten Tangerang	BB
5	Kota Tangerang	B
6	Kota Tangerang Selatan	B

Sasaran 2

Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

Sebagai indikator dari sasaran strategis Meningkatkan Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi adalah Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan. Indikator ini mengukur persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan rumusan jumlah kajian yang dimanfaatkan pada tahun berjalan dibagi dengan target jumlah seluruh kajian yang disusun setiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	40	89,47	223,68

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa target kinerja untuk Tahun 2023 adalah 40%. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hasil kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai indikator pembangunan, kebijakan publik, bahan masukan evaluasi ataupun sebagai rencana kegiatan perangkat daerah terkait pada tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2023, kajian yang dilakukan oleh Bidang Litbang sebanyak 19 kajian dengan judul sebagai berikut:



No	Nama Kajian	Tahun Penyusunan	Kajian di tindak lanjut		OPD yang menindak lanjut	Bentuk Tindak Lanjut
			Ya	Tidak		
1	Kajian Perwujudan Indikasi Program Rtrw Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031	2021	√		Bappeda	
2	Kajian Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan	2021	√		Bappeda	Penyusunan kelitbangan
3	Kajian Penyusunan Proyeksi Pad Berdasarkan Pdrb	2021	√		Bapenda	
4	Kajian Sinergitas Antar Moda Transportasi Massal Di Kota Tangerang Selatan	2021		√	Dishub	
5	Kajian Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021	2021	√		Bappeda, Setda	Penyusunan Lakip, RKPD
6	Evaluasi Efektifitas Dampak Terhadap Penanganan Covid-19 Tahun 2021	2021	√		Bappeda	Penyusunan RKPD
7	Analisa Iku Rpjmd Tahun 2021-2026	2021	√		Bappeda	Penyusunan RKPD, RPJMD
8	Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Tangerang Selatan	2022	√		Dinas Sosial, DP3AP2KB	Bahan penyusunan kegiatan dan pelatihan dengan sasaran peserta dari miskin ekstrim
9	Efektifitas Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan	2022	√		Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi, Bahan Rapat/penyusunan kegiatan.
10	Kajian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)	2022	√		Dinas Sosial, DP3AP2KB	Bahan penyusunan kegiatan dan pelatihan dengan sasaran peserta dari PPKS

11	Kajian Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan	2022	√		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi pelaksanaan
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (Ikli) Kota Tangerang Selatan	2022	√		SDABMBK dan Dinas Perhubungan	Penyusunan Lakip, RKPD, capaian RPJMD.
13	Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2022	2022	√		Disperkimta, DCKTR, DSDABMBK, DLH	Penyusunan Lakip, RKPD, capaian RPJMD.
14	Kajian Pembentukan Creative Hub Dan Pola Channeling Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kota Tangerang Selatan	2023	√		Dinas Koperasi UKM dan Dinas Pariwisata	Bahan Rapat/Koordinasi penyusunan kegiatan.
15	Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (Ikli) Kota Tangerang Selatan	2023	√		SDABMBK dan Dinas Perhubungan	Penyusunan Lakip, RKPD, capaian RPJMD.
16	Kajian Integrasi Pelatihan Tenaga Kerja Antar Perangkat Daerah Sesuai Rtk	2023		√	Dinas Tenaga Kerja	Bahan Rapat/Koordinasi penyusunan kegiatan.
17	Kajian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengurangi Timbunan Sampah Kota Tangerang Selatan	2023	√		Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi, Bahan Rapat/penyusunan kegiatan.
18	Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Pada Perangkat Daerah	2023	√		Bappelitbangda	Pedoman penyusunan kebijakan
19	Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	2023	√		Disperkimta, DCKTR, DSDABMBK, DLH	Penyusunan Lakip, RKPD, capaian RPJMD.

Diantara 19 kajian tersebut, 17 kajian yang bisa dimanfaatkan dan masih terdapat 2 kajian yang belum termanfaatkan kajian nomor 4 dan nomor 16. Kajian Sinergitas Antar Moda Transportasi Massal Di Kota



Tangerang Selatan dan Kajian Integrasi Pelatihan Tenaga Kerja Antar Perangkat Daerah Sesuai RTK.

Berdasarkan analisis tersebut, realisasi Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada tahun 2023 adalah 17 kajian yang dimanfaatkan tahun 2023 dari 19 kajian yang disusun sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 atau sebesar 89,47%. Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut mencapai 223,68 % (**Kriteria Capaian Sangat Tinggi**).

Capaian ini sangat tinggi dikarenakan penyusunan target yang rendah dan pada kenyataannya pemanfaatannya tinggi, untuk itu agar bidang pengampu merevisi kembali target tahun berikutnya.

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada sasaran ketiga ini sebelumnya berbunyi Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda, namun hasil dari evaluasi dalam penyusunan perjenjangan Kinerja menjadi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan sebagai indikator dari sasaran tersebut yang sebelumnya terdapat 2 (dua) indikator yaitu nilai Lakip dan Nilai RB, menjadi hanya 1 (satu) indikator yaitu hanya nilai Lakip saja, karena nilai mandiri RB sudah ditiadakan dengan capaian pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Dari Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip OPD	Nilai	A	A	100

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dalam sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu nilai Lakip OPD. Capaian indikator kinerja nilai Lakip OPD pada tahun 2023 memperoleh nilai A dari target sebesar nilai A, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (**kriteria capaian sangat tinggi**). Sama halnya seperti capaian SAKIP Kota, nilai Lakip Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 merupakan penilaian atas laporan kinerja pelaksanaan tahun 2022 oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan yang dirilis pada tahun 2023.



Tabel 3.6

Posisi Capaian Indikator Kinerja Dari Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir	Capaian (%)	Nilai Maks
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip OPD	Nilai	A	A	100	AA

Tabel di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra (tahun 2026). Capaian indikator kinerja nilai Lakip OPD telah memenuhi target di akhir Renstra. Tabel di atas juga menyajikan informasi nilai maksimal dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan ketentuan dimana nilai maksimal indikator kinerja nilai Lakip OPD adalah AA.

3.1.2 Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Pada tahun 2023 dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/408/AA.05/2023 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 27 November 2023, nilai LHE AKIP Kota Tangerang Selatan mendapatkan nilai 67,33 (Tingkat Akuntabilitas Kinerja B) meningkat dari sebelumnya LHE AKIP memperoleh nilai 66,92 (Tingkat Akuntabilitas Kinerja B).

Tabel 3.7

Nilai AKIP Kota Tangerang Selatan

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	21,94	22,12
b. Pengukuran Kinerja	30	19,84	19,93
c. Pelaporan Kinerja	15	9,94	10,02
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,20	15,26
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,92	67,33
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B



Tabel berikut memberikan interpretasi tingkat akuntabilitas kinerja (predikat) berdasarkan rating penilaian AKIP.

Tabel 3.8

Rating Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
6.	C	> 30 - 50	Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber: <https://www.menpan.go.id/>

Berdasarkan uraian pada Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi di atas, target kinerja yang ditargetkan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 maupun di akhir periode Renstra sangat tinggi. Dengan capaian pada tahun 2023 (hasil penilaian kinerja tahun 2022) sebesar 67,33 (predikat B), tentunya membutuhkan upaya ekstra untuk mencapai target di akhir periode Renstra Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan yang nilai sempurna (predikat AA). Di sisi lain RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 hanya menargetkan predikat AKIP di BB.

Dari uraian di atas pada Sub Bab Analisis Capaian Kinerja, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan meliputi:

1. Terdapat tiga indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yaitu 1) nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota, (2) nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota. Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut kesemua realisasinya belum memenuhi target sebagaimana perjanjian kinerja yang telah disepakati.
2. Target akhir Renstra mendekati atau mencapai nilai maksimal (nilai sempurna) sehingga menjadi tantangan yang sangat berat untuk dicapai. Jika target akhir Renstra tercapai, maka pencapaian SAKIP Kota Tangerang Selatan dapat mencapai predikat AA (sangat memuaskan). Sementara target predikat SAKIP Kota Tangerang Selatan dalam RPJMD tahun 2021-2026 hanya BB (sangat baik).
3. Indikator nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota dan nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota cenderung semakin membaik setiap tahunnya.

Belum optimalnya capaian kinerja atas komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota Tangerang Selatan disebabkan belum terpenuhinya rencana kinerja secara utuh, rencana kinerja belum memenuhi standar yang baik dan perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Belum terpenuhinya rencana kinerja secara utuh diantaranya disebabkan oleh kondisi belum ditetapkannya rencana kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja, belum tersusunnya dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dan belum tersusunnya dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Rencana kinerja belum memenuhi standar yang baik diantaranya disebabkan oleh kondisi dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, belum optimalnya rumusan hasil (tujuan dan sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai secara jelas, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis, perencanaan kinerja belum menggambarkan *crosscutting* hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang urusan/perangkat daerah/unit kerja serta belum semua pegawai merumuskan dan menetapkan rencana kinerja. Sementara itu perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan disebabkan oleh kondisi belum tercapainya target kinerja secara baik, belum dilaksanakan pengendalian (pemantauan dan evaluasi) kinerja secara baik, belum dilakukannya perbaikan rencana kinerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja serta belum optimalnya komitmen unit kerja dan pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

Belum optimalnya capaian kinerja atas komponen pengukuran kinerja dalam SAKIP Kota Tangerang Selatan disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja, pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja diantaranya disebabkan oleh kondisi belum tersusunnya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan

berkelanjutan diantaranya disebabkan oleh kondisi belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja, belum optimalnya relevansi data pengukuran kinerja yang dikumpulkan, belum semua level organisasi melakukan pemantauan pengumpulan data kinerja serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja.

Bappelitbangda telah melakukan upaya perbaikan kinerja diantaranya dengan menugaskan personil perencana melakukan pendampingan terhadap satu atau lebih Perangkat Daerah sesuai dengan penugasan. Personil yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pengendalian (pemantauan dan evaluasi) sampai kepada pelaporan. Namun masih terdapat permasalahan berupa kesenjangan tingkat pemahaman antar personil baik di Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan maupun perencana di Perangkat daerah dalam penerapan perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian target kinerja. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kapasitas personil Bappelitbangda dalam perencanaan kinerja melalui berbagai upaya di antaranya pendidikan, pelatihan, *coaching*, *mentoring* maupun magang. Selanjutnya personil yang berkompeten melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam perencanaan serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Sasaran 2

Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

Capaian kinerja pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi mencapai 223,68% dari target 40% yang artinya kajian-kajian yang dilaksanakan di lingkungan Bappelitbangda oleh Bidang Litbang sebagian besar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Tingginya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi mencapai lebih dari target karena kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang sesuai dengan usulan-usulan kajian yang diberikan oleh Perangkat Daerah, namun target yang di tentukan ternyata terlalu rendah sehingga capainnya terlalu tinggi, hal ini perlu di reviu Kembali pada perencanaan target kerjanya.

Untuk memaksimalkan hasil kajian-kajian tersebut, didukung oleh Analis Hasil Penelitian yang melakukan verifikasi terhadap hasil-hasil kajian yang dilaksanakan sehingga kualitas kajian yang disusun bernilai baik.

Sasaran 3



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Nilai Laki OPD pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan yang terus berjalan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan. Peningkatan akuntabilitas kinerja seharusnya diikuti dengan peningkatan kinerja utama yang menjadi *core business* Bappelitbangda yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan hasil kelitbang yang dimanfaatkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan yang terus digencarkan di tingkat nasional maupun daerah. Mulai perbaikan dan peningkatan berbagai regulasi dan implementasinya sampai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Demikian pula halnya pemahaman personil Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan yang semakin meningkat dalam penerapan akuntabilitas kinerja.

3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pencapaian kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah pegawai Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sejumlah 92 orang. Berdasarkan komposisi jenis kelamin terdiri dari 57 orang (61,96%) laki-laki dan perempuan sebanyak 35 orang (38,04%).

Tabel 3.9

Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1		1
2.	Sekretariat	23	8	31
3.	Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan	5	8	13
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	8	14
5.	Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian	7	5	12
6.	Bidang Penelitian Pengembangan	11	4	15
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	4	2	6



No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
JUMLAH TOTAL		57	35	92

Dari jumlah total 92 pegawai, 42 diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komposisi PNS berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 16 orang (38,09%), golongan III sebanyak 25 orang (59,52%) dan sisanya golongan II sebanyak 1 orang (2,38%).

Tabel 3.10

Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah PNS	Golongan																
			IV					III					II						
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	
1.	Kepala	1		1				1						0					0
2.	Sekretariat	8	1	1				2		2	1	2		5			1		1
3.	Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan	7	3					3		2	1	1		4					0
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	4					4	1		1			2					0
5.	Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian	7	1					1	3			3		6					0
6.	Bidang Penelitian Pengembangan	7	2					2	1		1	3		5					0
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	6	2	1				3		1		2		3					0
JUMLAH TOTAL		42	13	3	0	0	0	16	5	5	4	11	25	0	0	1	0	1	1

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) 1 orang, Pasca Sarjana (S-2) 19 orang Sarjana 19 orang dan Diploma 3 sebanyak 2 orang serta SLTA 1 orang.

Tabel 3.11

Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



No	Unit Kerja	Pendidikan										
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1.	Kepala		1									1
2.	Sekretariat		3	3		2						8
3.	Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan		6	1					1			8
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		3	3								6
5.	Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian		2	5								7
6.	Bidang Penelitian Pengembangan		2	4								6
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	1	2	3								6
TOTAL		1	19	19	0	2	0	0	0	0	0	42

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain didukung sumberdaya manusia juga didukung sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Tabel 3.12

Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
A.1	Kendaraan Roda 4	1	✓	
1	Honda CR-V TC Prestige	1	✓	
2	Mitsubishi/Xpander	5	✓	
3	Suzuki Ertiga AV1414F DX M/T	1	✓	
4	Toyota Kijang Innova V	1	✓	
5	FORD NEW RANGGER DOUBLE CABIN XLS 4X4 2.2L TDCi-H MT VIN 2015	1	✓	
6	Chevrolet SPIN 1.5 LT 2 A/T	1	✓	
7	Toyota Rush 1.5 G A/T	4	✓	
8	Toyota Avanza G M/T	3	✓	
A.2	Kendaraan Roda 2		L	
1	Suzuki FL 125 RCDF	2	✓	
2	Suzuki FL 125 RCDF	1	L	✓
3	Honda NF 125 TRF	4	✓	
4	Honda GL 15A1RR MT	1	✓	
5	Honda GL 15A1RR MT	1	L	✓

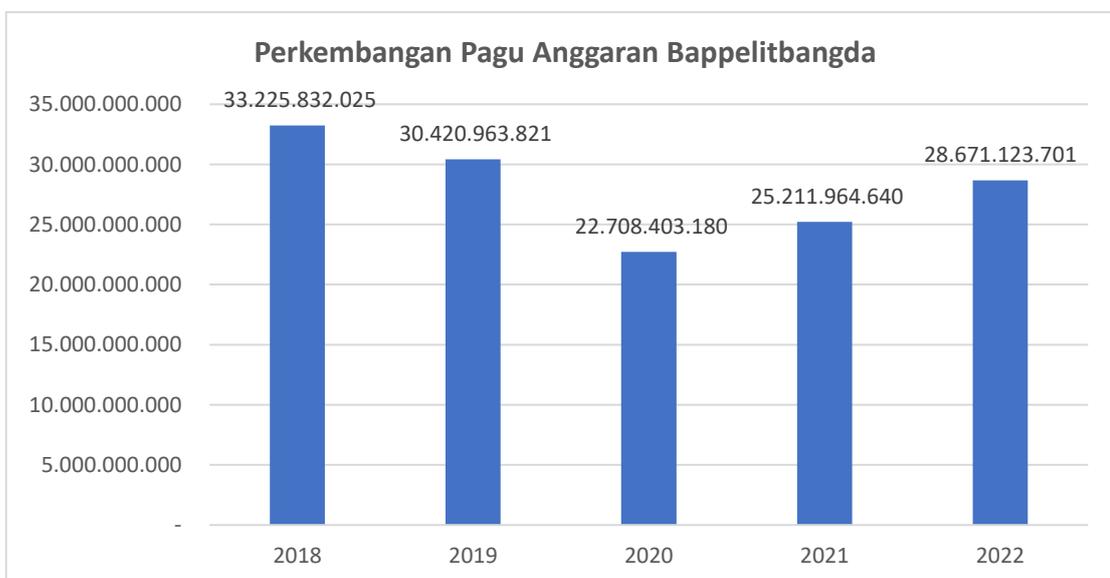


No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
6	Honda GL15B1DF MT	1	✓	
7	Honda NC110A1C AT	2	✓	
8	Honda NF12A1CF M/T	1	✓	
9	Honda AFX12U21C08 M/T	1	✓	
10	Yamaha 1DY	1	✓	
11	Honda A1F02N36M1 A/T	2	✓	
12	Honda AFX12U21C08 M/T	1	✓	
B	Lemari		L	
1	Lemari Besi/Metal	2	✓	
2	Lemari Kayu	9	✓	
3	Lemari Display	3	✓	
4	Lemari Penyimpan	5	✓	
5	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	✓	
6	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	✓	
C	Filing Kabinet		L	
1	Filing Cabinet Kayu	3	✓	
D	Laptop dan PC Komputer		L	
1	ASUS NOTEBOOK UX333FA-A5811T	3	✓	
2	Dell XPS 9305	2	✓	
3	Laptop Asus ZenBook Flip S UX371EA	4	✓	
4	Dell Notebook Vostro 3400	4	✓	
5	Dell Latitude 3410	4	✓	
6	Asus ExpertBook B1400	3	✓	
7	Asus Zenbook UX5401EA OLED 714	3	✓	
8	Dell NB XPS 9310	1	✓	
9	Laptop HP 240 G8 (61G52PA)	4	✓	
10	Asus Notebook B1400CEAE-EB5851WS	4	✓	
11	Asus Notebook B5302CEA-KG7150WS	1	✓	
12	Apple MacBook Pro 13 [MYD92ID/A]	1	✓	
13	PC iMac 24" M1	1	✓	
14	Desktop Aspire C24-1650 DQ.BFSSN.004	1	✓	
15	PC Asus S500TC	2	✓	
16	P.C Dell Optiplex 7080MT	1	✓	
17	ASUS AIO PC	1	✓	
18	Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G	1	✓	
E	Printer		L	
1	Canon Pixma Ink Efficient G3010	15	✓	
2	Epson L1300 A3 Ink Tank Printer	2	✓	
3	Printer HP OfficeJet Pro 7740	2	✓	
4	Printer Canon G3010	6	✓	
5	Canon G3010 Printer	6	✓	
F	Lcd Infocus/Projector		L	
1	EPSON EB-2055	1	✓	
2	VIEW SONIC LCD PROJECTOR	1	✓	
3	BENQ PROJECTOR	1	✓	
G	Inventaris Lainnya		L	
1	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	8	✓	



No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
2	Brother Scanner Document DS-640	5	✓	
3	Scanner Plustek Smartoffice PS396 Plus	1	✓	
4	Sofa	10	✓	
5	Meja Rapat	21	✓	
6	Meja Kerja Kayu	15	✓	
7	Meja Kerja Besi/Metal	1	✓	
8	Tenveo Video Conference Camera	6	✓	
9	LG 43UN731C0TC Commercial Full Smart TV	5	✓	
10	Sharp LED TV 70' 4T-C70CK3X	2	✓	
11	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	✓	
12	Kursi Rapat	40	✓	
13	Meja Tambahan	12	✓	
14	Rak-Rak Penyimpan	4	✓	
15	Locker	7	✓	
16	Microwave Oven	2	✓	
17	Microphone/Wireless MIC	1	✓	
18	Dispenser	4	✓	
19	Sound System	2	✓	
20	Cold Storage (Alat Pendingin)	3	✓	
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	✓	
22	Alat Penghancur Kertas	3	✓	
23	Fuji Film X-T20 KIT 16-50mm	1	✓	
24	Bracket Standing Peralatan	4	✓	
25	Mesin Absen	1	✓	
JUMLAH		297		

Sementara itu dari aspek sumberdaya keuangan pagu anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 33.214.608.055. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2021.



Gambar 3.3

Perkembangan Pagu Anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan

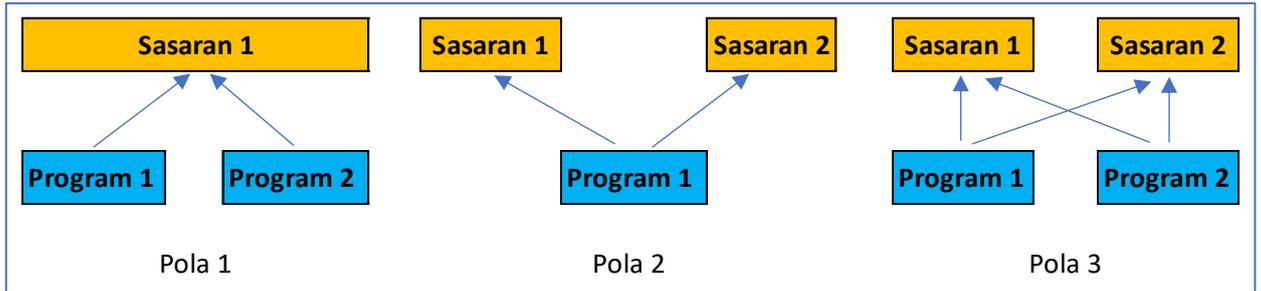
3.1.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta aturan lainnya yang menjadi turunannya.

Terdapat 4 (empat) program yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi: (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; serta (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program diselenggarakan untuk mencapai sasaran perangkat daerah, di mana terdapat pola pencapaian sasaran meliputi:

1. Satu sasaran dicapai melalui satu atau beberapa program.
2. Satu program diselenggarakan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran.
3. Kombinasi antara pola 1 dan pola 2.

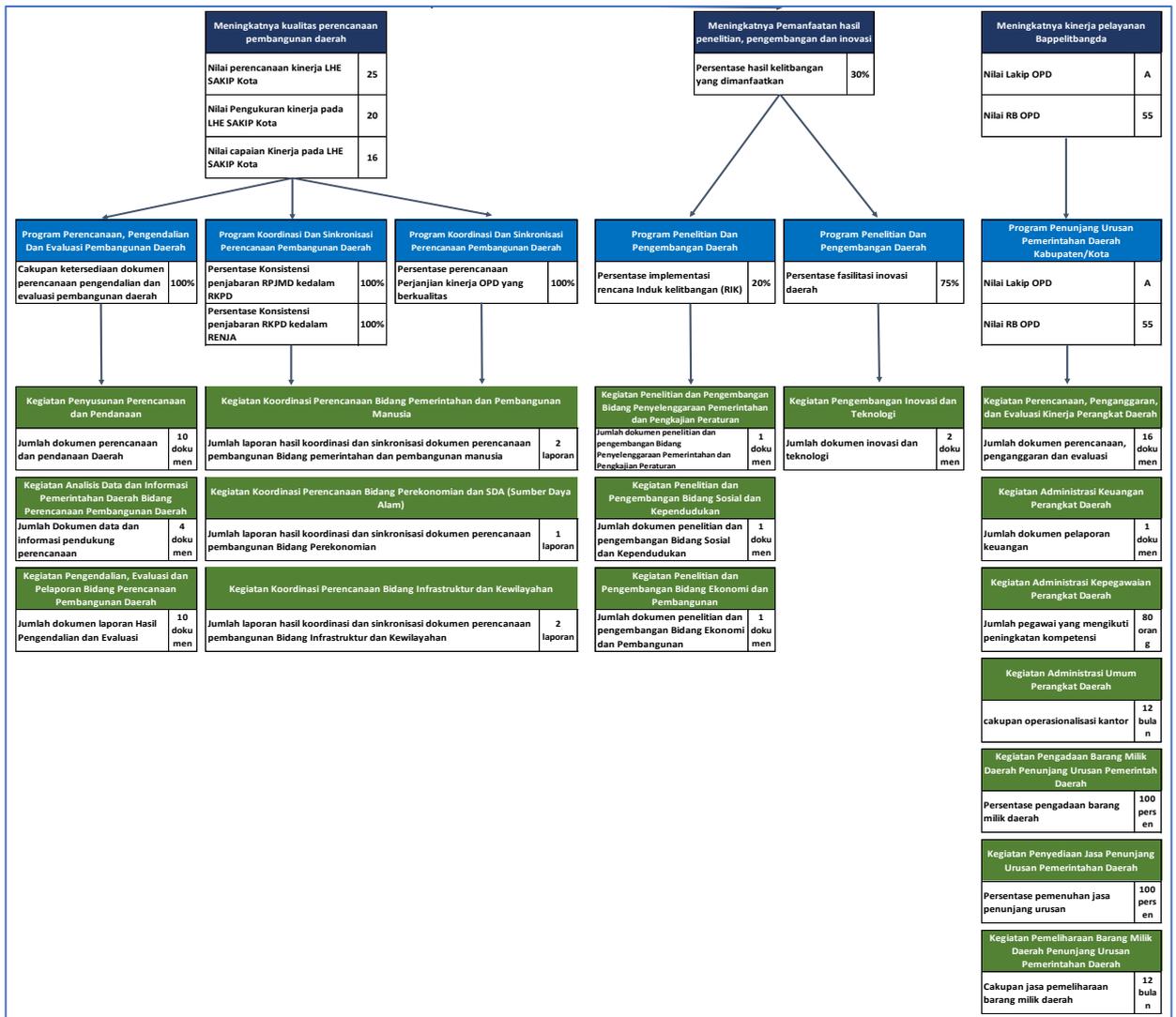




Gambar 3.4

Pola Pencapaian Sasaran Melalui Penyelenggaraan Program

Pada tahun 2023, pencapaian masing-masing sasaran strategis Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 mengikuti pola 1, di mana terdapat sasaran yang dicapai melalui penyelenggaraan beberapa program.



Gambar 3.5



Cascading Pencapaian Sasaran Melalui Penyelenggaraan Program dan Kegiatan
Oleh Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Gambar di atas menjelaskan pola hubungan pencapaian sasaran melalui penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 di mana pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan 2 indikator yaitu nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota (target 26), nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota (target 21) dicapai melalui:
 - a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (target 100%) dilaksanakan melalui:
 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah (target 10 dokumen).
 - Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator jumlah dokumen data dan informasi pendukung perencanaan (target 4 dokumen).
 - Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator 7jumlah dokumen laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (target 10 dokumen).
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator persentase konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPD (target 100%), persentase konsistensi penjabaran RKPD kedalam RENJA (target 100%) dan persentase perencanaan Perjanjian Kinerja OPD yang berkualitas (target 100%) dilaksanakan melalui:
 - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (target 2 laporan).

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian (target 1 laporan).
 - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (target 2 laporan).
2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, dengan indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan (target 40%) dicapai melalui:
- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator Persentase implementasi rencana Induk kelitbangan (target 40%) dan indikator persentase fasilitasi inovasi daerah (target 80%) dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan indikator jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (target 1 dokumen).
 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan indikator jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (target 1 dokumen).
 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan indikator jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (target 1 dokumen).
 - Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan indikator Jumlah dokumen inovasi dan teknologi (target 2 dokumen).

Selain itu, terdapat sasaran lain yaitu sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai Lakip OPD (target A). Capaian kinerja sasaran ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis lainnya, yang dicapai melalui penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator dan target yang sama dengan sasaran strategis. Kegiatan yang dilakukan meliputi:



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (target 16 dokumen).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator jumlah dokumen pelaporan keuangan (target 1 dokumen).
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi (target 80 orang).
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator cakupan operasionalisasi kantor (target 12 bulan).
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator persentase pengadaan barang milik daerah (target 100%).
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator persentase pemenuhan jasa penunjang urusan (target 100%).
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator cakupan jasa pemeliharaan barang milik daerah (target 12 bulan).

Masing-masing kegiatan dijabarkan secara operasional ke dalam berbagai sub kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih detail dan relevan dengan sasaran program dan indikatornya. Berbagai sub kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dalam rangka menghasilkan keluaran yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis meliputi:

Tabel 3.13

Outcome/Output yang Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip	Nilai	A	A
1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda	dokumen	16	16

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	8
		Terlaksananya Forum PD	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan Analisa Resiko	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan IKU/PERKIN	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kinerja 2023	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan Renja 2024	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan Renja Perubahan 2023	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan SIPD	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan SPIP	dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1
		Tersusunnya RKA 2024	Dokumen	1	1
		Terusunnya DRPK Perubahan 2024	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	2
		Terusunnya DRPK Perubahan 2023	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1
		Tersusunnya DPA Murni 2024	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1
		Tersusunnya DPA Pergeseran 2023	Dokumen	1	1
		Tersusunnya DPA Perubahan 2023	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1
		Tersedianya Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	10

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Data SiRUP	Laporan	1	1
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Data TEPR	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan Capaian RPJMD	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan E-Dalev	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan Evaluasi Renstra	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan LKPJ	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Laporan	1	1
		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Bappeda	dokumen	1	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	40	40
		Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	1
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1	1
		Tersedianya Pelaporan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1
		Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	laporan	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	4
		Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	laporan	4	4
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	80	80

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1
		Terbentuknya Tim Reformasi birokrasi	Tim	1	1
		Tersedianya dokumen Rancangan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan	laporan	1	1
		Tersedianya laporan evaluasi peraturan dan perundangan yang tidak harmonis	laporan	1	1
		Tersedianya laporan implementasi RB	laporan	1	1
		Tersedianya laporan Inventarisasi Inovasi Pelayanan dan Rencana Tindak Lanjut	laporan	1	1
		Tersedianya laporan MONEV Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Secara Berkala.	laporan	1	1
		Tersedianya laporan monev Pelaksanaan SOP	laporan	1	1
		Tersedianya laporan Survei Kepuasan Masyarakat	dokumen	1	1
		Tersedianya peta proses bisnis	dokumen	1	1
		Tersedianya Rencana Aksi RB	dokumen	1	1
		Tersedianya Sarana Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan	laporan	1	1
		Tersedianya SOP Perangkat Daerah	dokumen	1	1
		Tersedianya laporan kegiatan PPID Pembantu	laporan	1	1
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	87	87
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	87	87
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kegiatan	1	1
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	80	80
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kegiatan	1	1
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan operasionalisasi kantor Bappeda	bulan	12	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
		Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tahun	1	1

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
		Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	10	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
		Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tahun	1	1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
		Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tahun	1	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
		Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tahun	1	1
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	1	1
		Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	tahun	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
		Tersedianya operasional Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1	1
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1
		Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	tahun	1	1
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1
		Tersedianya sewa gedung	tahun	1	1
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	Persen	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tahun	1	1
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	38	38
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tahun	1	1
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan Daerah	Dokumen	10	10
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	1
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	38	38
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	400	400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	2	2
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pendukung perencanaan	Dokumen	4	4
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Masukan	3	3
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	100	100
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	1	1
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen	10	10
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah Yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja	2	2
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi penjabaran RKPD kedalam RENJA	%	100	100
		Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPD	%	100	100

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Persentase perencanaan Perjanjian kinerja OPD yang berkualitas	%	100	86,49
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Laporan	2	2
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Rakorbid Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1
		Tersedianya laporan Koordinasi Pengumpulan Data dan Pembahasan Capaian RPJMD & RKPD Mitra Bidang Pemerintahan Umum	laporan	1	1
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat	7	7
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi RKA/DPA murni, pergeseran dan perubahan OPD Mitra Bidang Pemerintahan	Perangkat	7	7
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada OPD Mitra Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	Laporan	1	1
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Terlaksananya Konvergensi Program Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi	Kegiatan	1	1
		Terlaksananya Koordinasi dan FGD Forum Kota Sehat	Kegiatan	1	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat	7	7
		Terlaksananya Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia Per Triwulan	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Forum Anak	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Forum Kota Sehat	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pasca Musrenbang	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Stunting	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Penganggaran Responsif Gender untuk APE	laporan	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	laporan	1	1
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup bidang Ekonomi	dokumen	1	1
		Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	dokumen	1	1
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan APBD 2024 di lingkup Bidang Perekonomian	dokumen	1	1
		Terlaksananya Penyusunan APBD-P 2023 di lingkungan Bidang Ekonomi	dokumen	1	1
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	opd	6	6
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dokumen	1	1
		Terlaksananya Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	dokumen	1	1
		Terlaksananya Verifikasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	dokumen	1	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	opd	6	6
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dokumen Pembangunan Daerah Lingkungan Bidang Ekonomi	dokumen	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkungan Bidang Ekonomi (RENSTRA)	dokumen	1	1
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkungan Bidang Ekonomi (RKPD)	dokumen	1	1
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	2	2
	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen	4	4

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat	4	4
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat	4	4
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat	9	9
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dokumen Pembangunan Daerah bidang kewilayahan	Perangkat	9	9
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersinkronisasinya renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	laporan	1	1
	PROGRAM PENELITIAN DAN	Persentase implementasi rencana Induk kelitbangan (RIK)	%	40	49

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	PENGEMBANGAN DAERAH				
		Persentase fasilitasi inovasi daerah.	%	80	87
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	1
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi Change Management Officer (CMO)	laporan	1	1
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1
		Terlaksananya Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	Laporan	1	1
		Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Penelitian	Dokumen	1	1
		Tersedianya laporan jaringan penelitian	laporan	1	1
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Laporan	1	1
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan data dan pengkajian peraturan	laporan	1	-
	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan	1	1
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	1	1
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	2
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	1

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Tolok Ukur	Pengukuran Kinerja			
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	1
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	2
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi	Dokumen	2	2
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Koordinasi lomba Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan	laporan	1	1
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1
		Tersedianya laporan Koordinasi Penguatan SIDA Kota Tangerang Selatan	dokumen	1	1
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	laporan	1	1
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2	2
		Tersedianya laporan Koordinasi Innovative Government Award (IGA) dan IDSD	laporan	2	2
		Tersedianya laporan Koordinasi Pembentukan Tim Seleksi Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan	laporan	1	1
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi hasil kajian kelitbangan	Orang	150	150
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	1
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	Laporan	1	1
		terlaksananya fasilitasi hak kekayaan intelektual hasil inovasi daerah	haki	10	10

Berdasarkan table di atas, capaian kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana (100%). Di sisi lain sebagaimana diuraikan sub bab sebelumnya tidak semua indikator kinerja sasaran dapat dicapai sesuai dengan target. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan belum mampu mengungkit capaian sasaran sesuai rencana.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tentunya menggunakan sumber daya anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu anggaran dalam DPA merupakan nilai maksimal yang dapat digunakan untuk menghasilkan *output* suatu kegiatan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pagu anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebesar Rp. 33.214.608.055 (pagu anggaran dalam Perubahan APBD).

Realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.890.353.733 (93% dari pagu) merupakan besaran sumber daya keuangan yang digunakan untuk mencapai kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adapun realisasi anggaran lebih rinci berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (%)			Sisa Anggaran	
			Fisik	Keuangan		(Rp.)	(%)
			(%)	(Rp)	(%)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.770.016.295	100,00	25.103.755.583	89,50	1.666.260.712	10,50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.917.000	100,00	281.876.500	83,42	56.040.500	16,58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.185.300	26,69	73.485.000	21,75	16.700.300	4,94
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.690.000	2,87	7.865.000	2,33	1.825.000	0,54
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.490.000	1,62	5.490.000	1,62	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.705.000	1,98	4.110.000	1,22	2.595.000	0,77
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.490.000	3,40	9.300.000	2,75	2.190.000	0,65

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.732.500	4,36	14.732.500	4,36	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.624.200	59,07	166.894.000	49,39	32.730.200	9,69
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.968.586.171	100,00	15.492.641.080	97,02	475.945.091	2,98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.771.444.171	98,77	15.301.787.080	95,82	469.657.091	2,94
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60.147.000	0,38	57.672.000	0,36	2.475.000	0,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.718.000	0,49	75.804.000	0,47	1.914.000	0,01
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.051.000	0,09	14.370.000	0,09	681.000	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.226.000	0,28	43.008.000	0,27	1.218.000	0,01
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	672.820.250	100,00	569.470.600	84,64	103.349.650	15,36
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.000.000	10,55	71.000.000	10,55	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.141.000	6,41	3.600.000	0,54	39.541.000	5,88
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	476.388.000	70,80	453.650.000	67,43	22.738.000	3,38
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.471.450	3,04	15.600.200	2,32	4.871.250	0,72
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.819.800	9,19	25.620.400	3,81	36.199.400	5,38
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.535.128.392	100,00	3.959.061.497	87,30	576.066.895	12,70
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.188.900	0,75	33.185.000	0,73	1.003.900	0,02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.545.103.453	34,07	1.403.115.000	30,94	141.988.453	3,13
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	330.156.000	7,28	300.415.000	6,62	29.741.000	0,66
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338.610.000	7,47	327.412.000	7,22	11.198.000	0,25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.786.300	2,93	131.517.500	2,90	1.268.800	0,03
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.800.000	0,64	19.200.000	0,42	9.600.000	0,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.092.111.939	46,13	1.728.726.797	38,12	363.385.142	8,01
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.691.800	0,48	15.490.200	0,34	6.201.600	0,14
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.680.000	0,26	-	-	11.680.000	0,26

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.900.000	100,00	148.111.450	96,87	4.788.550	3,13
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.900.000	100,00	148.111.450	96,87	4.788.550	3,13
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.486.206.850	100,00	3.332.552.880	95,59	153.653.970	4,41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.486.206.850	100,00	3.332.552.880	95,59	153.653.970	4,41
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.616.457.632	100,00	1.320.041.576	81,66	296.416.056	18,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.101.169.200	68,12	807.666.100	49,97	293.503.100	18,16
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	515.288.432	31,88	512.375.476	31,70	2.912.956	0,18
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.362.501.430	100,00	3.116.664.400	83,08	245.837.030	16,92
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.304.355.800	100,00	2.286.504.400	99,23	17.851.400	0,77
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	622.269.675	27,00	619.298.300	26,88	2.971.375	0,13
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	210.725.000	9,14	210.575.000	9,14	150.000	0,01
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	753.700.700	32,71	738.970.900	32,07	14.729.800	0,64
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	297.874.800	12,93	297.874.800	12,93	-	-
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	95.606.000	4,15	95.606.000	4,15	-	-
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	324.179.625	14,07	324.179.400	14,07	225	0,00
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	266.210.600	100,00	181.267.000	68,09	84.943.600	31,91
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	89.263.600	33,53	80.972.000	30,42	8.291.600	3,11
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	5.840.000	2,19	5.840.000	2,19	-	-

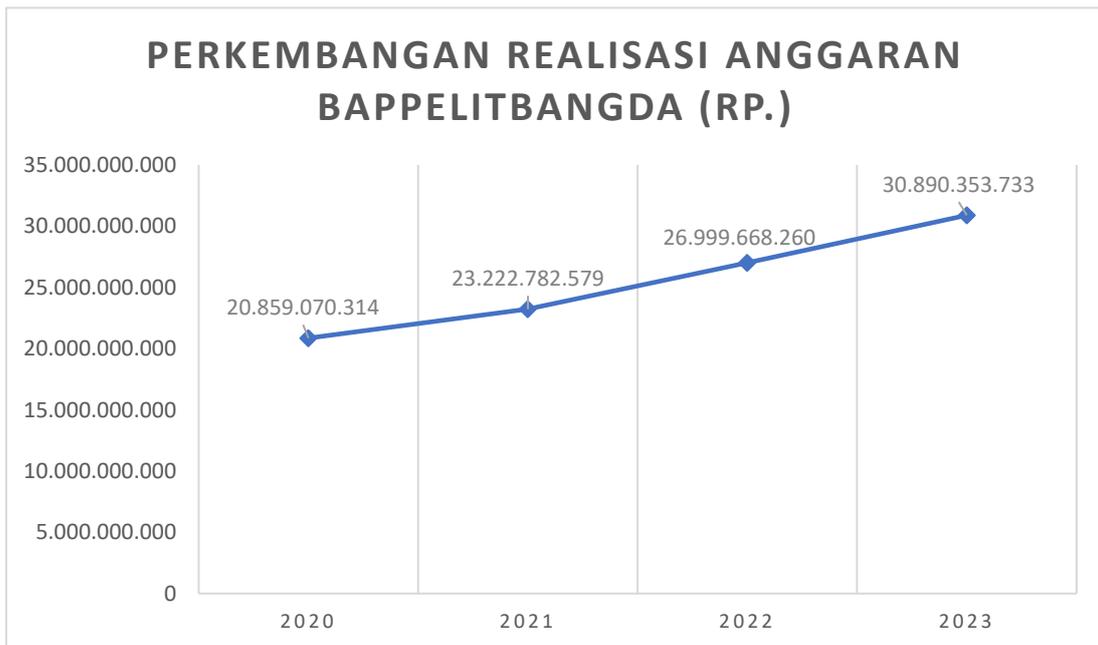
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	171.107.000	64,28	94.455.000	35,48	76.652.000	28,79
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	791.935.030	100,00	648.893.000	81,94	143.042.030	18,06
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	294.648.700	37,21	244.600.000	30,89	50.048.700	6,32
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	44.928.810	5,67	5.840.000	0,74	39.088.810	4,94
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	452.357.520	57,12	398.453.000	50,31	53.904.520	6,81
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.834.497.360	100,00	1.626.113.570	88,50	208.383.790	11,50
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	649.017.260	100,00	608.639.570	93,78	40.377.690	6,22
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	23.505.000	3,62	23.505.000	3,62	-	-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.046.000	3,09	16.396.000	2,53	3.650.000	0,56
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.810.000	3,98	25.810.000	3,98	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	225.957.700	34,82	221.107.600	34,07	4.850.100	0,75
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	57.803.100	8,91	56.803.000	8,75	1.000.100	0,15
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.884.000	1,68	10.884.000	1,68	-	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	97.750.190	15,06	79.996.890	12,33	17.753.300	2,74

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	187.261.270	28,85	174.137.080	26,83	13.124.190	2,02
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	557.820.400	100,00	482.186.000	86,44	75.634.400	13,56
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	71.130.000	12,75	51.345.000	9,20	19.785.000	3,55
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	56.280.000	10,09	43.585.000	7,81	12.695.000	2,28
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	134.151.900	24,05	105.230.000	18,86	28.921.900	5,18
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	296.258.500	53,11	282.026.000	50,56	14.232.500	2,55
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	627.659.700	100,00	535.288.000	85,28	92.371.700	14,72
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	52.865.000	8,42	49.940.000	7,96	2.925.000	0,47
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34.119.000	5,44	32.360.000	5,16	1.759.000	0,28
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.033.500	9,56	53.070.000	8,46	6.963.500	1,11
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	119.092.500	18,97	100.085.000	15,95	19.007.500	3,03
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	89.402.500	14,24	67.410.000	10,74	21.992.500	3,50
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	29.675.000	4,73	15.890.000	2,53	13.785.000	2,20

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	121.532.500	19,36	117.128.000	18,66	4.404.500	0,70
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	120.939.700	19,27	99.405.000	15,84	21.534.700	3,43
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.247.592.970	100,00	1.043.820.180	70,72	193.722.790	25,32
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	143.225.000	100,00	55.645.000	38,85	87.580.000	61,15
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	67.160.000	46,89	32.160.000	22,45	35.000.000	24,44
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	48.700.000	34,00	5.660.000	3,95	43.040.000	30,05
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	20.825.000	14,54	17.825.000	12,45	3.000.000	2,09
	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	6.540.000	4,57	-	-	6.540.000	4,57
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	131.075.800	100,00	96.710.000	73,78	34.365.800	26,22
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	131.075.800	100,00	96.710.000	73,78	34.365.800	26,22
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	377.964.400	100,00	348.620.000	79,07	19.294.400	5,10
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	106.054.800	28,06	101.620.000	26,89	4.434.800	1,17
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	59.800.000	15,82	49.750.000			
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	106.054.800	28,06	96.100.000	25,43	9.954.800	2,63
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	106.054.800	28,06	101.150.000	26,76	4.904.800	1,30
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	595.327.770	100,00	542.845.180	91,18	52.482.590	8,82
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	151.237.790	25,40	124.895.000	20,98	26.342.790	4,42
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang	364.670.180	61,26	361.770.180	60,77	2.900.000	0,49

	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	28.100.000	4,72	18.860.000	3,17	9.240.000	1,55
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	37.739.800	6,34	28.740.000	4,83	8.999.800	1,51
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	13.580.000	2,28	8.580.000	1,44	5.000.000	0,84
	Total	33.214.608.055	100,00	30.890.353.733	93,00	2.324.254.322	7,00

Sejalan dengan semakin membaiknya pasca Pandemi Covid-19, pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2023 juga cenderung meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Lebih jelasnya perkembangan realisasi anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 3.6

Perkembangan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan



Gambar 3.7

Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 mempertanggungjawabkan capaian atas Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Tangerang Selatan selaku pemberi dan Kepala Bappelitbangda selaku penerima mandate serta memuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk mendukung kinerja Bappelitbangda yang berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota Tangerang Selatan.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, meliputi:

1. Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota pada tahun 2023 sebesar 22,12. Dari target sebesar 26, maka capaian kinerja mencapai 87,88% (kriteria capaian tinggi).
2. Nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota pada tahun 2023 sebesar 19,93. Dari target sebesar 21, maka capaian kinerja mencapai 82,55% (kriteria capaian tinggi).
3. Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan pada tahun 2022 sebesar 89,47% Dari target sebesar 40%, maka capaian kinerja mencapai 223,68 % (kriteria capaian sangat tinggi).
4. Nilai Lakip OPD pada tahun 2023 memperoleh nilai A dari target sebesar nilai A, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (kriteria capaian sangat tinggi).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tidak seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target, masih terdapat capaian indikator kinerja kurang dari 100%. Namun dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan.

Pencapaian indikator sasaran strategis Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan didukung sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan. Pagu anggaran Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 33.214.608.055, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.890.353.733 (93% dari pagu).



Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dalam menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja di masa mendatang, di antaranya meliputi:

1. Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Bappelitbangda berperan dalam pencapaian sasaran strategis daerah, yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota, nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota masih belum memenuhi target dan masih jauh di bawah target akhir periode Renstra. Target yang ditetapkan terlalu tinggi melebihi ekpektasi dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.
3. Pencapaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai target sesuai dengan rencana, namun belum diikuti pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan. Output yang dihasilkan dari kegiatan dan sub kegiatan belum dapat mengungkit kinerja sasaran Bappelitbangda.

4.2 Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan perlu dilakukan upaya dalam menyikapi tantangan kedepannya di antaranya melalui:

1. Personil Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan agar lebih memberikan perhatian terhadap capaian indikator kinerja dalam sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Perlu dilakukan evaluasi atas capaian Renstra Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026. Termasuk menilai rasionalisasi atas target kinerja yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai serta merekomendasikan terget kinerja yang memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*) namun tetap menantang (*challenging*).
3. Menyusun rencana kinerja jangka panjang dan jangka pendek serta menetapkannya dengan mempedomani RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, serta menyusun pohon kinerja dan *cascading*.



4. Menyusun pedoman perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja bagi seluruh perangkat daerah.
5. Tetap melanjutkan pendampingan kepada perangkat daerah, namun disertai dengan peningkatan kapasitas pendamping dari Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan.
6. Perlunya menerapkan manajemen kinerja PNS secara baik dan membentuk tim pengelola kinerja PNS di tingkat perangkat daerah.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH**
Jl. Maruga Raya No 1 Serua, Ciputat Tangerang Selatan
(Puspemkot Gedung II Lantai 2 – 3)
www.bappeda.tangerangselatankota.go.id email: bappeda_tangsel@yahoo.com